



# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatannya.

Magetan, Agustus 2023

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN**



**ARI WIDYATMOKO, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650904 198603 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	1
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>6</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
	2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>40</b>
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	40
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
	3.3 Program dan Kegiatan.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>45</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>56</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.4 Latar Belakang**

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Inspektorat merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja Inspektorat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja Inspektorat adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD dan RPD. Rencana kerja Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2023 yang berada dalam masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, Renstra Inspektorat Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Inspektorat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada Inspektorat Daerah juga disusun berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah, dimana Renstra Inspektorat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja.

### **2.4 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Magetan Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata

- Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan;
21. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
  22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun dan memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Magetan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
6. Menjabarkan rencana strategis Inspektorat tahun 2024-2026
7. Menjadi acuan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Uraian ringkas tentang landasan hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun daerah.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Berisi tentang sistematika penyajian/penyusunan Renja Perangkat Daerah.

# **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023, dikaitkan dengan target capaian Renstra.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta isu – isu strategis lainnya.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dari pengamatan lapangan (Tabel T-C.32).

# **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

## **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

## **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, targetcapaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu. Juga dicantumkan tanggal, nama Kepala Perangkat Daerah dan stempel.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada umumnya program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)		
<b>2019-2020</b>												
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>79.00</b>	<b>Angka</b>	80,14	Angka				80,14	Angka	<b>101,44</b>
	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya ketersediaan pelayanan jasa administrasi perkantoran (bulan)	24	Bulan	24	Bulan				24	Bulan	<b>100</b>
	Pelayanan Perjalanan Dinas dan luar Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (bulan)	24	Bulan	24	Bulan				24	Bulan	<b>100</b>
	Survey Kepuasan Masyarakat	Skor/nilai IKM	153	Skor	159,59	Skor				159,59	Skor	104,31
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi (%)	100	%	100	%				100	%	100

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6			7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=(10/4)	
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (kali)	120	kali	72	kali								72	kali	60,00
	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (paket)	24	paket	24	paket								24	paket	100,00
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor (unit)	14	Unit	86	Unit								86	Unit	614,29
	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu (%)	100	%	100	%								100	%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pengendalian yang dihasilkan (dokumen)	20	dokumen	20	dokumen								20	dokumen	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Penyelesaian Penilaian angka Kredit Aparatur Pengawas (%)	100	%	100	%								100	%	100
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah PPA yang dilakukan penilaian angka kredit (orang)	28,6	Orang	55	Orang								55	Orang	192,31
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Memiliki Sertifikat	100	%	100	%								100	%	100

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.	2	3	4		5		6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)	
		Diklat pengawasan (%)											
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan (orang)	94	Orang	94	Orang					94	Orang	100,00
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan KDH	Persentase Penyelesaian Dokumen pengawasan (%)	100	%	100	%					100	%	100
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah SKPD yang diaudit (SKPD)	110	SKPD	104	SKPD					104	SKPD	94,55
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Penanganan kasus pengaduan (kasus)	50	Kasus	42	kasus					42	kasus	84,00
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terseleenggaranya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi (bulan)	12	Bulan	12	Bulan					12	Bulan	100,00
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan (kali)	12	kali	12	kali					12	kali	100,00
	Review Laporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Review LKD (dokumen)	2	dokumen	2	dokumen					2	dokumen	100,00
	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi AKIP (SKPD)	110	SKPD	110	SKPD					110	SKPD	100,00
	Review Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen Laporan Review SAKIP (dokumen)	2	dokumen	2	dokumen					2	dokumen	100,00

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9		11=(10/4)			
	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah dokumen monitoring tindak lanjut hasil pengawasan (dokumen)	2	dokumen	1	dokumen						1	dokumen	50,00
	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen review pengadaan barang dan jasa (dok)	2	dokumen	4	dokumen						4	dokumen	200,00
	Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	Jumlah dokumen laporan hasil review perencanaan dan penganggaran (dokumen)	24	dokumen	22	dokumen						22	dokumen	91,67
	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat (persen)	100	%	100	%						100	%	100
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan (kasus)	50	Kasus	41	kasus						41	kasus	82,00
	Program Peningkatan Pengendalian Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN (%)	100	%	100	%						100	%	100
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terselenggaranya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi(bulan);	24	Bulan	12	Bulan						12	Bulan	50,00
	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan elemen kapabilitas SPIP(%)	100	%	100	%						100	%	100

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)				Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)					
	Peningkatan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah dokumen Tingkat Maturitas SPIP (dokumen)	2	dokumen	2	dokumen							2	dokumen	100,00
	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM (dokumen)	2	dokumen	2	dokumen							2	dokumen	100,00
	Program Peningkatan Pengendalian Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN (%)	100	%	100	%							100	%	100
	Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah (Gratifikasi)	Jumlah pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi (kali)	24	kali	24	kali							24	kali	100,00
	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar (bulan)	24	Bulan	24	Bulan							24	Bulan	100,00
	Peningkatan aksi Pemberantasan korupsi ( Monev RAD PK )	Jumlah dokumen laporan RAD PK (dokumen)	4	dokumen	4	dokumen							4	dokumen	100,00
<b>2021-2022</b>															
6.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat // angka</b>	<b>80,5</b>	<b>angka</b>	<b>81,09</b>	<b>angka</b>	<b>80,5</b>	<b>angka</b>	81,45	angka	101,18		81,43	angka	101

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6			7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=(10/4)	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah // Dokumen	12	Dokumen	1	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100			12	Dokumen	100
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah // Dokumen	10	Dokumen	0	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100			10	Dokumen	100
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah // Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100			1	Dokumen	50
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	171,81			24	bulan	100
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai // kali	4	kali	2	kali	2	kali	5	kali	250			7	kali	175
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	94	orang	56	orang	47	orang	44	orang	93,62			100	orang	106

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)						
		Perundang-undangan // orang														
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah // bulan</b>	<b>24</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>100</b>			24	bulan	100
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor // unit; bulan	24	unit; bulan	24	bulan	15	unit	15	Unit	100			39	Unit	163
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100



KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)				Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6	9	10=5+7+9		11=(10/4)
		dan Konsultasi SKPD // bulan													
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah // unit	1	unit	1	unit	0	unit	0	unit	0,00		1	unit	100
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya // unit	1	unit	1	unit	0	unit	0	unit	0,00		1	unit	100
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100		24	bulan	100
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100		24	bulan	100
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100		24	bulan	100
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100		24	bulan	100
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100		24	bulan	100

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6	9	10=5+7+9		11=(10/4)	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung-Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan // %	100	%	100	%	<b>100</b>	%	100	%	100			200	%	200
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	136,70			24	bulan	100
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah // Dokumen	16	Dokumen	25	Dokumen	8	Dokumen	10	Dokumen	125			35	Dokumen	219

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)						
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah // Dokumen	110	Dokumen	78	Dokumen	55	Dokumen	52	Dokumen	94,55			130	Dokumen	118
6.01.02.2.01.03	Reviu laporan kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja // Dokumen	27	Dokumen	9	Dokumen	14	Dokumen	15	Dokumen	107,14			24	Dokumen	89
6.01.02.2.01.04	Reviu laporan keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan // Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	400			5	Dokumen	250
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa // Dokumen	36	Dokumen	24	Dokumen	18	Dokumen	18	Dokumen	100			42	Dokumen	117
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF // kali	18	kali	12	bulan	6	kali	6	kali	100			18	kali	100
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu // bulan</b>	24	bulan	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>104,17</b>			24	Bulan	100

KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6			7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=(10/4)	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	13	bulan	108,33			25	bulan	104
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi // %</b>	100	%	100	%	100	%	100	%	100			200	%	200
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan // dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100			2	dokumen	100
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan // dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	100			2	dokumen	100
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100			24	bulan	100
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah // dokumen	14	dokumen	2	dokumen	12	bulan	7	Dokumen	58,33			9	Dokumen	64
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penulisan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian	4	dokumen	2	dokumen	2	Dokumen	5	Dokumen	250			7	Dokumen	175

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)						
		Reformasi Birokrasi // dokumen														
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi // bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100		24	bulan	100	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas // bulan	14	bulan	12	bulan	2	Dokumen	5	Dokumen	250		17	Dokumen	121	
<b>2023</b>																
6.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeka Kepuasan Masyarakat // Angka	81	Angka								81	Angka	81	Angka	100
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah // Dokumen	20	Dokumen								20	Dokumen	20	Dokumen	100
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah // Dokumen	10	Dokumen								10	Dokumen	10	Dokumen	100

KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Target	Realisasi		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)			
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah // Dokumen	10	Dokumen					10	Dokumen	10	Dokumen	100
<b>6.01.01.2.02</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah // Bulan	12	Bulan					<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	100
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN // Orang/bulan	48	Orang/bulan					48	Orang/bulan	48	Orang/bulan	100
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah // Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>					<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100</b>
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai // Dokumen	2	Dokumen					2	Dokumen	2	Dokumen	100
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan // Orang	45	Orang					45	Orang	45	Orang	100
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah // Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>					<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100</b>

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=5+7+9		11=(10/4)
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor // Paket	2	Paket					2	Paket	2	Paket	100
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor // Paket	6	Paket					6	Paket	6	Paket	100
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga // Paket	1	Paket					1	Paket	1	Paket	100
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor // Paket	8	Paket					8	Paket	8	Paket	100
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan // Paket	5	Paket					5	Paket	5	Paket	100
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan // Dokumen	2	Dokumen					2	Dokumen	2	Dokumen	100
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD // Laporan	6	Laporan					6	Laporan	6	Laporan	100

KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5	6			7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=(10/4)
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah // Unit	1	Unit						1	Unit	1	Unit	100
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya // Unit	1	Unit						1	Unit	1	Unit	100
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah // Bulan	12	Bulan						12	Bulan	12	Bulan	100
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik // Laporan	12	Laporan						12	Laporan	12	Laporan	100
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor // Laporan	12	Laporan						12	Laporan	12	Laporan	100
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor // Laporan	12	Laporan						12	Laporan	12	Laporan	100
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah // Bulan	12	Bulan						12	Bulan	12	Bulan	100



KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5	6			7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=(10/4)
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan // Unit	6	Unit						6	Unit	6	Unit	100
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan // Unit	21	Unit						21	Unit	21	Unit	100
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya // Bulan	12	Bulan						12	Bulan	12	Bulan	100
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan // %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>						<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal // Bulan	12	Bulan						12	Bulan	12	Bulan	100
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah // Laporan	10	Laporan						10	Laporan	10	Laporan	100

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
			Target	Realisasi		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5	6			7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=(10/4)	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah // Laporan	25	Laporan							25	Laporan	25	Laporan	100
6.01.02.2.01.03	Reviu laporan kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja // Laporan	10	Laporan							10	Laporan	10	Laporan	100
6.01.02.2.01.04	Reviu laporan keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan // Laporan	1	Laporan							1	Laporan	1	Laporan	100
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa // Laporan	20	Laporan							20	Laporan	20	Laporan	100
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal // Kesepakatan	1	Kesepakatan							1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP // Dokumen	55	Dokumen							55	Dokumen	55	Dokumen	100
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu // Dokumen	7	Dokumen							7	Dokumen	7	Dokumen	100

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5	6			7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=(10/4)	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah // Laporan	5	Laporan							5	Laporan	5	Laporan	100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu // Laporan	5	Laporan							5	Laporan	5	Laporan	100
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi // %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>							<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan // Dokumen	1	Dokumen							1	Dokumen	1	Dokumen	100
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan // Rekomendasi	1	Rekomendasi							1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi // Dokumen	13	Dokumen							13	Dokumen	13	Dokumen	100
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah // perangkat daerah	5	perangkat daerah							5	perangkat daerah	5	perangkat daerah	100

KODE	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
			Target	Realisasi		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5	6			7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=(10/4)	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pendaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi // perangkat daerah	46	perangkat daerah							46	perangkat daerah	46	perangkat daerah	100
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi // Kegiatan	4	Kegiatan							4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas // perangkat daerah	5	perangkat daerah							5	perangkat daerah	5	perangkat daerah	100

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya.

### Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (level)	3	2
2	Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP
		Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A
		Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP (%)	100	100
		Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	90	92
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	85	97,32

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Magetan Tabel T-C.30. adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi 2023	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Level Kapabilitas APiP			3	3	3	3	3	2	2	2	2		3	
2	Opini BPK (opini)			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	
3	Persentase tindak lanjut temuan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan APiP (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
4	Persentase tindak lanjut temuan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)			90	90	90	90	90	100	100	94,85	92		92	
5	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
6	Rata-rata pencapaian Nilai AKiP SKPD			BB	BB	BB	A	A	B	BB	BB	A		A	
7	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN			n.a.	n.a.	75	85	100	n.a.	n.a.	87,89	97,32		100	

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Magetan tahun 2022 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Namun masih ada beberapa target kinerja yang tidak tercapai.

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 dari BPKP, Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan berada pada level 2 (*Structured*) dengan skor 2,71 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Elemen 1 Pengelolaan SDM berada di level 3
- b. Elemen 2 Praktik Profesional berada di level 2
- c. Elemen 3 Akuntabilitas & Manajemen Kinerja berada di level 3
- d. Elemen 4 Budaya & hubungan Organisasi berada di level 3
- e. Elemen 5 Struktur tata Kelola berada di level 3
- f. Elemen 6 Peran dan Layanan berada di level 2

sehingga belum mencapai target level 3.

Pada tahun 2022 menerima pengaduan sebanyak 17 kasus diantaranya kasus terkait pengaduan masyarakat sebanyak 11 kasus, perceraian sebanyak 5 kasus, indisipliner sebanyak 1 kasus dan seluruh kasus telah selesai ditindak lanjuti, dengan demikian realisasinya sebesar 100%.

Sasaran pada indikator ini adalah kegiatan evaluasi SAKIP SKPD tahun 2021 Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi terhadap 46 SKPD. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, elemen - elemen yang dinilai antara lain : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dari Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat Daerah terhadap SKPD, rata-rata pencapaian Nilai AKIP SKPD mendapatkan nilai 85,75 dengan kategori predikat A (Memuaskan).

Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 71,72 dengan predikat BB.

Opini BPK Kabupaten Magetan setiap tahunnya selama lima tahun terakhir dapat memenuhi target yang diharapkan. Kabupaten Magetan mendapatkan opini WTP yaitu wajar tanpa pengecualian, hal ini berarti pada saat dilakukan penilaian segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2022 adalah WTP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

Pelaporan LHKASN melalui aplikasi SIHARKA pada tahun 2022, status laporan harta kekayaan ASN Pemerintah Kabupaten Magetan yang dilaporkan adalah sebagai berikut jumlah pegawai wajib LHKASN wajib LHKASN 6625 orang, sudah lapor 6448 orang (97,32%), belum lapor 176 orang (12,11%).

### **2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, menyusun laporan hasil pengawasan, melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas terdapat kegiatan

yang secara mandatori harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yaitu antara lain perhitungan kerugian Negara (PKN), Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, Koordinasi antara APIP dan APH, Koordinasi dan supervisi pencegahan (Korupsi) KPK.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat Daerah mempunyai tugas yaitu membantu Bupati bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP masih belum optimal
2. Masih adanya kasus yang melibatkan ASN serta adanya pengaduan masyarakat.
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP dan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai rekomendasi oleh SKPD.
5. Tuntutan pelayanan masyarakat (pengaduan masyarakat) terhadap pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN.
6. Peningkatan kinerja ASN
7. Pemahaman tentang SPIP dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah SDM APIP yang ada belum memadai dengan latar belakang pendidikan yang beragam sedangkan dalam menghadapi perkembangan kegiatan dan permasalahan dalam obyek pemeriksaan yang semakin kompleks dan rumit dituntut peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparat pengawasan secara terus menerus disamping penyediaan buku petunjuk/pedoman dan standar audit.
2. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini menyebabkan terjadinya temuan berulang dan sulit ditindaklanjuti.
3. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan dalam rangka evaluasi tugas-tugas Inspektorat Daerah untuk tahun berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala, Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
2. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern termasuk dalam peningkatan penerapan SAKIP.
3. Adanya kerjasama koordinasi dan sinkronisasi antara Aparat Pengawas Internal dan Aparat Pengawas Eksternal;
4. Adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan masyarakat.
5. Adanya peran serta masyarakat yang aktif untuk melaksanakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian



kinerja antara lain:

1. Pemahaman tentang SPIP dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan belum optimal.
2. Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP dan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai rekomendasi oleh SKPD
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Magetan ini.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD**

Seiring dengan penguatan APIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, maka pada tahun 2024 Inspektorat Daerah memiliki 3 program, 11 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Rencana Program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2024. Pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan mengajukan pagu rancangan awal RKPD sebesar Rp. 9.534.655.039,- (Sembilan milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga puluh Sembilan rupiah), Hasil analisis kebutuhan pagu anggaran menjadi Rp. 9.223.261.039,- (Sembilan milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga puluh Sembilan rupiah) kegiatan yang dilaksanakan di fokuskan kepada 2 (dua) program strategis dan 1 (satu) program penunjang untuk merealisasikan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 6.655.306.039,-. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin perkantoran. Hasil analisis kebutuhan anggaran terdapat perubahan yaitu ada penambahan pagu pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan menjadi Rp. 450.000.000,- yang semula Rp. 350.000.000,- hal ini untuk membiayai diklat fungsional penjenjangan auditor ahli muda sebanyak 9 orang serta bimtek substansi pengawasan lainnya sedangkan untuk target kinerja tidak ada perubahan .
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Ranwal RKPD sebesar Rp 1.797.430.000,- . Hasil analisis kebutuhan anggaran ada perubahan pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yaitu ada pengurangan pagu semula Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 200.000.000,- namun target kinerja tidak ada perubahan. Rencananya untuk Tahun 2024 akan dilaksanakan Audit Operasional, Audit Kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit aitu pada anggaran investigasi, Reviu Laporan Keuangan, reviu DAK, reviu Dana BOS, Reviu Dana Desa, Reviu LPPD, Monev Desa serta perencanaan dan penganggaran reponsif gender . Dari hasil laporan monev Desa, akan dianggarkan pemberian *reward* kepada desa dengan pengelolaan keuangan dan administrasi terbaik. Kemudian setiap tahun digelar Pengawasan Daerah (Larwasda) untuk meningkatkan kinerja

pengawasan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan evaluasi untuk terus lebih baik dalam hal pengawasan, termasuk dalam hal tindak lanjut pemeriksaan.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Ranwal menjadi Rp. 770,525,000,-. Dari hasil analisis kebutuhan anggaran dan target kinerja, tidak ada perubahan. Rencananya pada tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP, Kapabilitas APiP, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Penilaian ZI, Pengendalian gratifikasi dan evaluasi SAKIP.

Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan menyusun rencana kebutuhan sebagaimana tercantum dalam tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dibawah ini:

**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah // Angka</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>81,45 Angka</b>	<b>6.866.700.039</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>81,45 Angka</b>	<b>6.655.306.039</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu II Dokumen</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah II Dokumen	Kabupaten Magetan	10 Dokumen	25.000.000	Kabupaten Magetan	10 Dokumen	25.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II Laporan	Kabupaten Magetan	10 Dokumen	25.000.000	Kabupaten Magetan	10 Dokumen	25.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah II Dokumen</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>36 Dokumen</b>	<b>5.679.920.039</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>36 Dokumen</b>	<b>5.368.526.039</b>

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKP			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN II orang/Bulan	Kabupaten Magetan	47 Orang/bulan	5.668.920.039	Kabupaten Magetan	47 Orang/bulan	5.357.526.039
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD II Laporan	Kabupaten Magetan	12 Laporan	11.000.000	Kabupaten Magetan	12 Laporan	11.000.000
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur II Orang</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>47 Orang</b>	<b>375.000.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>47 Orang</b>	<b>475.000.000</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian II Dokumen	Kabupaten Magetan	10 Dokumen	15.000.000	Kabupaten Magetan	10 Dokumen	15.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai II Dokumen	Kabupaten Magetan	1 Dokumen	10.000.000	Kabupaten Magetan	1 Dokumen	10.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan II	Kabupaten Magetan	45 Orang	350.000.000	Kabupaten Magetan	45 Orang	450.000.000
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah II Paket</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>45 Paket</b>	<b>394.360.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>45 Paket</b>	<b>394.360.000</b>

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan II Paket	Kabupaten Magetan	2 Paket	3.000.000	Kabupaten Magetan	2 Paket	3.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan II Paket	Kabupaten Magetan	6 Paket	165.060.000	Kabupaten Magetan	6 Paket	165.060.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan II Paket	Kabupaten Magetan	2 Paket	8.000.000	Kabupaten Magetan	2 Paket	8.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan II Paket	Kabupaten Magetan	8 Paket	42.000.000	Kabupaten Magetan	8 Paket	42.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan II Paket	Kabupaten Magetan	3 Paket	20.000.000	Kabupaten Magetan	3 Paket	20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan II Dokumen	Kabupaten Magetan	12 Dokumen	6.300.000	Kabupaten Magetan	12 Dokumen	6.300.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD II laporan	Kabupaten Magetan	12 Laporan	150.000.000	Kabupaten Magetan	12 Laporan	150.000.000
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II Unit</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>1 Unit</b>	<b>35.000.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>1 Unit</b>	<b>35.000.000</b>

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPd			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan II Unit	Kabupaten Magetan	1 Unit	35.000.000	Kabupaten Magetan	1 Unit	35.000.000
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II Laporan</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>222.420.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>222.420.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan II Laporan	Kabupaten Magetan	12 Laporan	51.320.000	Kabupaten Magetan	12 Laporan	51.320.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan II Laporan	Kabupaten Magetan	12 Laporan	36.800.000	Kabupaten Magetan	12 Laporan	36.800.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan II Laporan	Kabupaten Magetan	12 Laporan	134.300.000	Kabupaten Magetan	12 Laporan	134.300.000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara II Unit</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>28 Unit</b>	<b>110.000.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>28 Unit</b>	<b>110.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya II Unit	Kabupaten Magetan	6 Unit	95.000.000	Kabupaten Magetan	6 Unit	95.000.000

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKP			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya II Unit	Kabupaten Magetan	21 Unit	5.000.000	Kabupaten Magetan	21 Unit	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi II Unit	Kabupaten Magetan	1 Unit	10.000.000	Kabupaten Magetan	1 Unit	10.000.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan II %</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>92 %</b>	<b>1.897.430.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>92 %</b>	<b>1.797.430.000</b>
<b>8</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal II Laporan</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>144 Laporan</b>	<b>1.757.430.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>144 Laporan</b>	<b>1.657.430.000</b>
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah II Laporan	Kabupaten Magetan	10 Laporan	300.270.000	Kabupaten Magetan	10 Laporan	300.270.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah II Laporan	Kabupaten Magetan	15 Laporan	320.450.000	Kabupaten Magetan	15 Laporan	320.450.000
	Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja II Laporan	Kabupaten Magetan	40 Laporan	327.710.000	Kabupaten Magetan	40 Laporan	327.710.000
	Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan II Laporan	Kabupaten Magetan	1 Laporan	30.000.000	Kabupaten Magetan	1 Laporan	30.000.000

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKP			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa II Laporan	Kabupaten Magetan	22 Laporan	323.000.000	Kabupaten Magetan	22 Laporan	323.000.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk II Kesepakatan	Kabupaten Magetan	1 Kesepakatan	156.000.000	Kabupaten Magetan	1 Kesepakatan	156.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP II Dokumen	Kabupaten Magetan	55 Dokumen	300.000.000	Kabupaten Magetan	55 Dokumen	200.000.000
<b>9</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu II Laporan</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>140.000.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>140.000.000</b>
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani II Laporan	Kabupaten Magetan	5 Laporan	70.000.000	Kabupaten Magetan	5 Laporan	70.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu II Laporan	Kabupaten Magetan	5 Laporan	70.000.000	Kabupaten Magetan	5 Laporan	70.000.000
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Level Kapabilitas APIP II Level; Persentase OPD yang mendapat nilai evaluasi SAKIP minimal BB II %;</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>3;90 %</b>	<b>770.525.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>3;90%</b>	<b>770.525.000</b>
<b>10</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>45.525.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>45.525.000</b>



NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan II Rekomendasi	Kabupaten Magetan	1 Rekomendas i	45.525.000	Kabupaten Magetan	1 Rekomenda si	45.525.000
11	<b>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan hasil pendampingan dan asistensi II Laporan</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>17 Laporan</b>	<b>725.000.000</b>	<b>Kabupaten Magetan</b>	<b>17 Laporan</b>	<b>725.000.000</b>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah II Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	10 perangkat daerah	116.000.000	Kabupaten Magetan	10 perangkat daerah	116.000.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi II Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	45 perangkat daerah	75.000.000	Kabupaten Magetan	45 perangkat daerah	75.000.000
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi II Kegiatan	Kabupaten Magetan	4 Kegiatan	400.000.000	Kabupaten Magetan	4 Kegiatan	400.000.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas II Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	3 perangkat daerah	134.000.000	Kabupaten Magetan	3 perangkat daerah	134.000.000
	<b>TOTAL</b>				<b>9.534.655.039</b>			<b>9.223.261.039</b>



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang melakukan penguatan Inspektorat Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Penguatan Kelembagaan Inspektorat melalui :

1. Penambahan Fungsi  
Pencegahan Korupsi dan Pengawasan RB menjadi Indikator Kinerja Inspektorat dan kelas jabatan Inspektur Daerah dapat dinaikkan setara dengan/minimal satu tingkat di bawah Sekda.
2. Pola Pelaporan  
LHP terkait indikasi kerugian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Adanya Nota Kesepahaman antara Mendagri dengan Kepala BPKP tentang pelaksanaan supervisi hasil pengawasan, agar terjaga independensi APIP tidak ada intervensi oleh pihak manapun, mengoptimalkan fungsi BPKP sebagai bagian dari pengawasan internal serta pengawasan APIP terjaga kualitasnya sesuai dengan standar profesi
3. Penambahan Kewenangan  
Penegasan fungsi Inspektorat Daerah sebagai perangkat Gubernur dan wakil pemerintah pusat
4. Kapasitas Kelembagaan  
Penambahan 1(satu) Irban untuk investigatif/penangan dumas. Terdapat unit kerja eselon III yang menangani fungsi secara khusus Pencegahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi
5. Menjaga Obyektivitas Pengawasan  
Pemberhentian dan pengangkatan Inspektur Daerah harus izin Mendagri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Bertujuan agar seleksi jabatan Inspektur Daerah menghasilkan calon yang kompeten, terjaga Independensi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan dan pola karier Inspektur Daerah dapat terjaga.

Selain itu prioritas penggunaan anggaran pengawasan digunakan untuk :

1. Kegiatan Pengawasan , yaitu :
  - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
  - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
  - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d) Reviu Laporan Keuangan;
  - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang

- berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
2. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
  3. sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
  4. Pemeriksaan Kinerja
  5. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
  6. Pengawasan yang bersifat Mandatori :
    - a) Kinerja Rutin Pengawasan (Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak, reviu DAK, evaluasi SPIP, monitoring penyerapan anggaran, monitoring dan evaluasi TLHP)
    - b) Pengawasan Prioritas Nasional (Tindak Lanjut Kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan Dana BOS)
  7. Pengawasan Reformasi Birokrasi (Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran pendampingan KDH membangun sub area penguatan pengawasan)
  8. Penegakan Integritas
    - a) Dukungan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas
    - b) Monitoring dan Evaluasi Aksi Pemberantasan Korupsi (MCP, LHKPN dan LHKAN)
  9. Peningkatan Kapabilitas APIP
    - a) Penerapan Manajemen Resiko
    - b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko
    - c) Audit Kinerja
    - d) Audit Investigasi
    - e) Pemeriksaan DAK Fisik
    - f) Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD
    - g) Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pengawasan lainnya
  10. Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan adalah merupakan implementasi dari dokumen Renstra Inspektorat Daerah tahun 2024-2026. Rencana strategis tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui program kegiatan setiap tahunnya selama 3 tahun.

Adapun tujuan dan sasaran strategis (jangka menengah) Inspektorat Kabupaten Magetan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan</b>		Hasil Survei Penilaian Integritas	77	77	77
		Terwujudnya Kinerja Pengawasan Internal Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3	3	3
2	<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada urusan Pengawasan</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Urusan Pengawasan	81,45	81,50	81,55
		Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada urusan Pengawasan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Urusan Pengawasan	81,45	81,50	81,55

Sesuai tabel tujuan dan sasaran strategis (jangka menengah Inspektorat) diatas, terdapat 2 tujuan yang ditetapkan berikut dengan indikator tujuan beserta sasaran dan indikator kinerjanya. indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah adalah hasil Survei Penilaian Integritas dengan Target 77. Sedangkan indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah adalah Level Maturitas SPIP dengan target Level 3. Secara ringkas tujuan diatas dapat dinarasikan sebagai berikut

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan”

Mengandung makna bahwa seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

pola kerja profesional harus lebih dikedepankan dengan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat, dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika APIP.

APIP harus dapat menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan perannya sebagai aparat pengawasan intern. Tidak kalah pentingnya melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang baik antara aparat pengawasan dengan Perangkat Daerah untuk meningkatkan komitmen dan kesepahaman bersama dari unsur pimpinan tingkat atas, sampai kebawah dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rancangan, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih.

Mengandung makna APIP bukan lagi hanya bergerak pada ranah pengawasan akuntabilitas keuangan dan profesionalitas kinerja para birokrat. Tetapi akan menjadi tumpuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maju dan modern dengan cara membangun kompetensi yang lebih tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik, mewujudkan integritas auditor internal yang benar-benar independen, yang berorientasi pada perubahan ke arah yang lebih baik dan menjalankan fungsi assurance dan consulting yang membangun. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan internal menjalankan fungsi dan perannya yang utama, yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, tidak semua indikator kinerja sebagaimana yang disajikan dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD diatas digunakan dalam pengukuran keberhasilannya. Dalam rangka pengukuran capaian tujuan strategis hanya dipilih beberapa indikator yang mempunyai nilai strategis yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU beserta target yang ingin dicapai tahun 3 (tiga) Tahun kedepan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN		TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Kinerja Pengawasan Internal Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP dari BPKP dengan kategori penilaian sebagai berikut :		3	BPKP	Inspektorat
		TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR			
		Belum Ada /Level 0	Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0)			
		Rintisan / Level 1	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)			
		Berkembang / Level 2	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)			
		Terdefinisi /Level 3	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)			
		Terkelola Dan Terukur / Level 4	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)			
		Optimum /Level 5	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)			

**3.3. Program dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut:

- Program dan kegiatan Rutin sebagai berikut :

**1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA**

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Program/Kegiatan untuk mendukung sasaran Terwujudnya Kinerja Pengawasan Internal Pemerintah adalah sebagai berikut :

**1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

**2) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
- b) Pendampingan dan Asistensi.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan.

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan ini disusun juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan membantu Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD Se- Kabupaten Magetan agar dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2024 seiring dengan penguatan APIP untuk menyesuaikan keadaan tersebut.

Dalam kaitan untuk mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Inspektorat Daerah memiliki fungsi pengawasan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:





						Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	10 Laporan	20 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	25.000.000,00
6	0	0	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.368.526.039,00				5.368.526.039,00	
6	0	0	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	47 Orang/bulan	36 Dokumen	5.357.526.039,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	5.357.526.039,00
6	0	0	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
						Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	12 Laporan	36 Dokumen	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.000.000,00
6	0	0	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							475.000.000,00				475.000.000,00	
6	0	0	2.05	0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												

						Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	10 Dokumen	47 Orang	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	15.000.000,00
6	0	0	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	1 Dokumen	47 Orang	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000,00
6	0	0	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	45 Orang	47 Orang	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	450.000.000,00
6	0	0	2.06		Adevisitral Umum Perangkat Daerah													
													394.360.000,00				394.360.000,00	
6	0	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	2 Paket	45 Paket	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00
6	0	0	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	6 Paket	45 Paket	165.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	165.060.000,00
6	0	0	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	2 Paket	45 Paket	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8.000.000,00
6	0	0	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	8 Paket	45 Paket	42.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	42.000.000,00
6	0	0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	3 Paket	45 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00
6	0	0	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	12 Dokumen	45 Paket	6.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.300.000,00

6	0	0	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	12 Laporan	45 Paket	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00
6	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah							35.000.000,00				35.000.000,00	
6	0	0	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00
6	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							222.420.000,00				222.420.000,00	
6	0	0	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	12 Laporan	36 Laporan	51.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.320.000,00
6	0	0	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	12 Laporan	36 Laporan	36.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.800.000,00

6	0	0	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
	1	1			Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	12 Laporan	36 Laporan	134.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	134.300.000,00	
6	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							110.000.000,00				110.000.000,00	
6	0	0	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
	1	1			Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	6 Unit	28 Unit	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	95.000.000,00	
6	0	0	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
	1	1			Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	21 Unit	28 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	5.000.000,00	
6	0	0	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
	1	1															

					Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,45 Angka	1 Unit	28 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00			
6	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							1.797.430.000,00							1.797.430.000,00	
6	0	0	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							1.657.430.000,00								1.657.430.000,00
6	0	0	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah															
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	10 Laporan	144 Laporan	300.270.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		300.270.000,00		
6	0	0	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	15 Laporan	144 Laporan	320.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan		320.450.000,00		
6	0	0	2.01	0003	Revisi Laporan Kinerja															
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	40 Laporan	144 Laporan	327.710.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	40 Laporan		327.710.000,00		
6	0	0	2.01	0004	Revisi Laporan Keuangan															
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	1 Laporan	144 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Laporan		30.000.000,00		

6	0	0	2.01	0005	Pengawasan Desa															
	1	2			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	22 Laporan	144 Laporan	323.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan	323.000.000,00			
6	0	0	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal															
	1	2			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	1 Kesepakatan	144 Laporan	156.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	156.000.000,00			
6	0	0	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															
	1	2			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	55 Dokumen	144 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	55 Dokumen	200.000.000,00			
6	0	0	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										140.000.000,00					140.000.000,00
6	0	0	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah															
	1	2			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	5 Laporan	10 Laporan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	70.000.000,00			
6	0	0	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
	1	2																		



					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	5 Laporan	10 Laporan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	70.000.000,00			
6	0	0			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							770.525.000,00							770.525.000,00	
6	0	0	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan							45.525.000,00								45.525.000,00
6	0	0	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
					Level Kapabilitas APIP Persentase OPD yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP Minimal BB	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Level 90 %	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	45.525.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	45.525.000,00			
6	0	0	2.02		Pendampingan dan Asistensi							725.000.000,00							725.000.000,00	
6	0	0	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah															
					Level Kapabilitas APIP Persentase OPD yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP Minimal BB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Level 90 %	10 perangkat daerah	17 Laporan	116.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	116.000.000,00			
6	0	0	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
					Level Kapabilitas APIP Persentase OPD yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP Minimal BB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Level 90 %	46 perangkat daerah	17 Laporan	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	46 perangkat daerah	75.000.000,00			



## BAB V PENUTUP

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024. Selain itu penyusunan Rencana Kinerja juga dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga tujuan organisasi tetap dapat diwujudkan dan eksistensi organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rencana kerja

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dan dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa secara cepat dan tepat waktu dapat memenuhi kewajibannya memberikan tanggapan atas hasil temuan pemeriksaan (berupa tindak lanjut yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yang diperlukan) sehingga Inspektorat Daerah secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024.

Magetan,      Agustus 2023

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN**  
  
**ARI WIDYATMOKO, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650904 198603 1 001